

# PERANAN KOMITE SEKOLAH DI SMPN 1 SENDANA KECAMATAN SENDANA KABUPATEN MAJENE

## THE ROLE OF THE SCHOOL COMMITTEE IN SMPN 1 SENDANA SENDANA DISTRICT MAJENE REGENCY

Muhammad Hayat<sup>1)</sup>, Sulaiman Samad<sup>2)</sup>, Ratmawati T<sup>3)</sup>

<sup>1</sup>Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Jl. Bonto Langkasa, Kampus  
UNM Gunung Sari Baru, Makassar – 90222

<sup>1</sup>Email: [hayatlukman05@yahoo.com](mailto:hayatlukman05@yahoo.com)

<sup>2</sup>Email: [essamad.riset@gmail.com](mailto:essamad.riset@gmail.com)

<sup>3</sup>Email: [ratmawati.AP87@unm.ac.id](mailto:ratmawati.AP87@unm.ac.id)

### **Abstrak**

*Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: (1) Gambaran peranan komite sekolah dalam menjalankan fungsi sebagai badan pertimbangan (advisory agency) di SMPN 1 Sendana. (2) Gambaran peranan komite sekolah dalam menjalankan fungsi sebagai badan pendukung (supporting agency) di SMPN 1 Sendana. (3) Gambaran peranan komite sekolah dalam menjalankan fungsi sebagai badan pengontrol (controlling agency) di SMPN 1 Sendana. (4) Gambaran peranan komite sekolah dalam menjalankan fungsi sebagai badan penghubung (mediator agency) di SMPN 1 Sendana. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa data-data tertulis atau lisan dari orang atau dari perilaku yang diamati.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran komite sekolah di SMP Negeri 1 Sendana cukup optimal didalam beberapa peran seperti peran komite sebagai pemberi pertimbangan, dan sebagai mediator. Namun, sebagai badan pengontrol dan pendukung perannya belum optimal. Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, dan sebagai mediator sudah optimal dapat dilihat dari cukup aktifnya komite dalam mendukung program-program yang ada di sekolah baik yang bersifat akademik maupun non akademik. Selain itu, komite sekolah juga memberikan ide-ide serta saran kepada sekolah terkait program-program yang ada di sekolah serta ikut serta dalam mendanai program sekolah yang telah disetujui oleh komite sekolah. Komite sekolah juga telah menjembatani dengan baik antara pihak sekolah dengan orang tua siswa sehingga jika terjadi keluhan orang tua langsung bisa berkomunikasi dengan komite. Namun, dalam menjalankan perannya sebagai badan pengontrol dapat dilihat belum optimal Hal ini dikarenakan komite memiliki pekerjaan masing-masing diluar tugas mereka sebagai komite sekolah. Begitu juga peran komite sebagai pendukung belum baik.*

**Kata kunci:** Peranan Komite Sekolah.

### **Abstract**

*The purpose of this study is to find out: (1) The description of the role of the school committee in carrying out its function as an advisory agency in Sendana 1 Junior High School, Sendana District, Majene Regency. (2) The description of the role of the school committee in carrying out its function as a supporting agency in the Sendana SMPN 1*

*Sendana District, Majene Regency. (3) The description of the role of the school committee in carrying out its function as a controlling agency in the Sendana SMPN 1 Sendana District, Majene Regency. (4) A description of the role of the school committee in carrying out its function as a mediator agency in Sendana Middle School 1 Sendana District, Majene Regency. This type of research is qualitative research that is research that produces data in the form of written or oral data from people or from observed behavior.*

*The results of this study indicate that the role of school committees in SMPN 1 Sendana improving already optimal in some roles such as the role of the committee as a consideration, the role of the committee as a support body and the role of the committee as a mediator. However, in its role as a controlling body it can be seen that the school committee is not yet optimal. The role of the school committee as a consideration, as a support body and as a mediator has been optimally can be seen from the active committee in supporting the existing programs in schools both academic and non academic. In addition, the school committee also provided ideas and suggestions to schools on existing programs at school and participated in funding school programs approved by the school committee. School committees can also bridge well between the school with parents so that if there is a complaint parents can directly communicate with the committee. However, in carrying out its role as a controlling body can be seen not yet optimal This is because the committee has their own work outside of their duties as a school committee. And the role as supporting it's not optimal.*

**Keywords:** *Role of School Committees.*

## **1. PENDAHULUAN**

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan salah satu misinya adalah memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah. Pembinaan pendidikan dasar dan menengah adalah mewujudkan manajemen pendidikan berbasis sekolah dengan memperkenalkan Dewan pendidikan ditingkat kabupaten/kota serta pembentukan Komite sekolah ditingkat satuan pendidikan.

Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan (pasal 56 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Dapat dikatakan pada saat ini tanggung jawab masing-masing belum optimal, terutama peran serta masyarakat yang masih dirasakan belum banyak diberdayakan. Oleh karena itu, secara hakiki pembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pembangunan manusia. Upaya-upaya pembangua dibidang pendidikan, pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri. Karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara, didalamnya terkandung makna bahwa pemberian layanan pendidikan kepada individu, masyarakat, dan warga negara adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga.

Dewan pendidikan dan komite sekolah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS). Selanjutnya, guna memudahkan masyarakat dalam membentuk dewan pendidikan dan

komite sekolah, Menteri Pendidikan Nasional menerbitkan keputusan menteri Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002, menerangkan bahwa komite sekolah mempunyai peranan sebagai *advisory agency* (pemberi pertimbangan), *supporting agency* (pendukung kegiatan layanan pendidikan), *controlling agency* (sebagai pengontrol), sebagai mediator atau penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2016, menerangkan bahwa berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai komite sekolah salah satu tugasnya adalah menggalang dana dan sumberdaya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/duniasaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif.

Kenyataan menggambarkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini masih sebatas dalam bentuk memberikan dukungan pendanaan disekolah. Berbagai fenomena yang muncul antara lain komite sekolah hanya sebagai pendamping kepala sekolah dalam menentukan besarnya sumbangan pendidikan di sekolah, terkadang komite sekolah hanya berfungsi sebagai legalitas formal dalam suatu satuan pendidikan, komite sekolah seolah-olah berfungsi sebagai stempel kebijakan-kebijakan kepala sekolah, terjadinya persekongkolan antara kepala sekolah dengan komite sekolah, komite dianggap sebagai masalah baru oleh orang tua siswa karena menjadi aktor utama sekolah dalam mengumpulkan dana buat biaya pembangunan sekolah.

Masyarakat melalui komite sekolah di daerah-daerah kurang dilibatkan dalam pengembangan perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi proses pendidikan di sekolah seperti yang diharapkan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 8 dan 9, berbunyi “Masyarakat berhak berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan” (UNDANG-UNDANG Sisdiknas 2003:9). Masyarakat sementara ini masih banyak yang tidak mau tahu apa yang sedang terjadi di sekolah. Masyarakat hanya menanti hasil dari proses pendidikan sekolah tersebut melalui kelulusan yang dihasilkan.

Masyarakat menganggap bahwa proses pendidikan di sekolah adalah menjadi tanggungjawab sekolah dan pemerintah. Seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan proses yang berlangsung di sekolah yang menyediakan dan menentukan standarnya adalah pemerintah. Masyarakat tidak berhak untuk ikut terlibat dalam menentukan kebutuhan sekolah mulai dari sarana, ketenagaan, kurikulum, pengembangan sekolah, hingga manajemen kesiswaan. Hak dan kewajiban orang tua dalam UNDANG-UNDANG Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 7, mengatur bahwa : orang tua berhak berpartisipasi dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya, (UNDANG-UNDANG Sisdiknas, 2003:9).

Sekolah bertanggung jawab menentukan kebijakan, dalam melaksanakan kebijakan pendidikan tersebut agar disesuaikan dengan arah kebijakan pendidikan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sebagai penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional, sekolah bertugas untuk menjabarkan kebijakan pendidikan nasional menjadi program-program operasional penyelenggaraan pendidikan di masing-masing sekolah. Program tersebut terdiri dari penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan sejak dari mingguan sampai dengan tahunan yang sesuai dengan arah kebijakan serta kurikulum yang telah ditetapkan baik pada tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Sehingga setiap rencana dan program disusun serta dilaksanakan di sekolah harus mengacu pada standart

pelayanan minimal (SPM) yang diterapkan untuk pemerintahan Kabupaten/kota serta standar teknis yang diterapkan masing-masing satuan pendidikan.

Pendidikan di sekolah yang diselenggarakan dengan kondisi yang berlainan, dimungkinkan untuk dapat menggunakan sistem pendidikan dengan pendekatan pembelajaran yang berlainan. Sekolah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengurus dan mengatur pelaksanaan pendidikan. Kepala sekolah diberikan keleluasaan untuk mengelola pendidikan dengan jalan mengadakan serta memanfaatkan sumber-sumber daya pendidikan sendiri, asalkan sesuai dengan kebijakan dan standar yang ditetapkan.

Komite sekolah menjadi pendamping bahkan penyeimbang bagi sekolah-sekolah, sehingga setiap rencana dan program yang disusun oleh sekolah dapat diberikan masukan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh komite sekolah. Atas nama masyarakat komite sekolah dapat menyatakan setuju atau kurang setuju terhadap rencana yang telah disusun sekolah dengan syarat dapat memberi jalan keluar apabila kurang menyetujui program tersebut.

Selain melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sekolah dapat juga menyusun program pendidikan pada mata pelajaran muatan lokal yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan pada masyarakat. Fungsi komite sekolah disini dapat membantu sekolah-sekolah dalam mengumpulkan data mengenai kebutuhan serta potensi sumber daya manusia yang tersedia di dalam masyarakat untuk diterjemahkan/disosialisasikan ke dalam program mata pelajaran muatan lokal tersebut.

Komite sekolah dapat mengadakan pertemuan / rapat yang diadakan pada awal tahun, tengah tahun (semester), dan pada akhir tahun diadakan evaluasi program. Hal tersebut mengandung maksud bahwa pada penyusunan program, setelah dilaksanakan pada pertengahan perjalanan kita amati dan apabila ada hal yang kurang sesuai, diperbaiki supaya sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Pada akhir tahun diadakan evaluasi dengan maksud untuk mengecek apakah program yang direncanakan berjalan dengan baik dan sebagai acuan program yang akan datang atau berikutnya.

Namun kenyataan banyak orang tua siswa di sekolah enggan atau tidak menghadiri undangan sekolah jika orang tua siswa diundang pihak sekolah untuk membicarakan hal-hal seperti diatas. Fenomena-fenomena dalam keadaan seperti ini, maka komite sekolah akan dapat melaksanakan peranan dan fungsinya sebagai mediator untuk memfasilitasi terjadinya pertemuan antara pihak sekolah dengan orang tua siswa.

Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa hal yang dapat diperankan atau yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat melalui komite sekolah yaitu: membantu pelaksanaan program sekolah, memberikan sumbangan pemikiran mengenai berbagai hal untuk memajukan sekolah, membantu sekolah untuk menciptakan situasi yang *kondusif* bagi siswa untuk belajar dan membantu mengamankan fasilitas sekolah, melakukan kunjungan ke sekolah untuk mendorong motivasi belajar siswa, profesionalisme guru maupun meningkatkan akuntabilitas sekolah, melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan mendukung pemecahan masalah pembiayaan/pendanaan sekolah, turut memikirkan penyusunan kurikulum sekolah mendorong memajukan sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikannya, memfasilitasi kegiatan sekolah untuk melakukan kunjungan ke sekolah yang dinilai berkualitas, memberikan kesempatan bagi sekolah untuk melaksanakan program belajar di luar kelas/sekolah.

Tidak dapat dipungkiri secara rasional sistem kerja komite sekolah belum bisa maksimal, sebagai perpanjangan tangan masyarakat/orang tua wali murid atau disebut *stakeholder* pendidikan, fungsi dan peranan komite sekolah perlu dioptimalkan. Sehingga komite sekolah bisa berperan dan berfungsi sebagaimana mestinya atau yang diharapkan oleh masyarakat.

Secara konseptual komite sekolah sebagai lembaga pendidikan membangun kerjasama dengan baik, dengan demikian fungsi dan peranan kelembagaan dapat berperan

dengan baik. Sehingga akan nampak kekuatan dan kelemahan yang dapat segera diatasi. Sekolah adalah salah satu lembaga yang dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat bagi putra putri mereka untuk belajar menuntut ilmu, konsekuensi dari itu sekolah harus dapat menaruh kepercayaan pada masyarakat yang ditunjukkan dengan *output* (lulusan) yang berkualitas. Dalam arti *output* dari sekolah itu dapat diterima diperguruan tinggi yang favorit dan dapat diterima dipasaran kerja.

Komite sekolah sangat memegang peran penting bagi penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dengan adanya pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, pendukung, pengontrol dan mediator di satuan pendidikan.

Memperhatikan kondisi kenyataan di SMPN 1 Sendana , Komite sekolah belum menunjukkan kinerja sesuai dengan peranannya seperti pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator antara pemerintah dengan masyarakat disatuan pendidikan.

## 2. METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa data-data tertulis atau lisan dari orang atau dari perilaku yang diamati. Menurut Sugiyono (2012:15) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMPN 1 Sendana . Alasan memilih lokasi ini karena sekolah SMPN 1 Sendana adalah salah satu sekolah Model atau sekolah binaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Barat yang memiliki beberapa sekolah imbas dan diharapkan memiliki perangkat komite yang solid memerlukan optimalisasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2020

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian bservasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yang menggambarkan peranan maka diperoleh gambaran peranan komite sekolah sebagai berikut

### 1) Komite sekolah dalam melaksanakan Peran sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*)

Salah satu peranan komite sekolah adalah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Uno (2013:92) menyebutkan bahwa:

Peran komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan menunjukkan tanggapan atau respon dari komite dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dari pihak sekolah harus meminta pertimbangan kepada komite sekolah dalam menentukan kebijakan, program dan kegiatan sekolah. Salah satunya yakni dengan adanya program unggulan apa yang ingin dikembangkan oleh lembaga sekolah itu sendiri.

Nugraha (2018) mengenai bentuk lain dari pertimbangan komite sekolah dapat dilakukan dalam berbagai hal, yaitu:

- a. Mengenai program dan kegiatan yang disusun dalam rencana pembangunan, RKS, serta RKT dalam satuan pendidikan;
- b. Pelaksanaan tugas guru, dalam menjalankan tugasnya agar tidak sewenang-wenang dalam mengatasi siswa;

- c. Peningkatan kedisiplinan guru dan membantu dalam mencari solusi dalam menghadapi suatu permasalahan;
- d. Mengembangkan bakat dan minat siswa, sesuai dengan potensi yang mereka miliki;

Berdasarkan hal tersebut di atas dan dihubungkan dengan informasi yang didapatkan oleh peneliti dari informan maka dapat disimpulkan bahwa komite sekolah telah mampu menjalankan perannya dalam memberikan pertimbangan pada sekolah dalam menjalankan kegiatan sekolah, hal ini juga terlihat pada Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dimana dalam penetapannya komite sekolah ikut bertanda tangan. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa pihak sekolah tidak akan melaksanakan sebuah kegiatan tanpa ada persetujuan dari komite sekolah.

Selain hal tersebut di atas salah satu bukti yang menggambarkan bahwa komite sekolah memberikan pertimbangan yaitu dalam pengesahan dokumen 1 kurikulum satuan pendidikan, komite sekolah juga ikut bertanda tangan dimana dalam dokumen tersebut memuat pedoman pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah serta tata tertib sekolah.

### **2) Komite sekolah dalam melaksanakan Peran sebagai badan pendukung (*supporting agency*)**

Peranan komite sekolah selanjutnya yaitu sebagai pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Uno (2013:93) menyebutkan bahwa:

Dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat berupa pemikiran, ide, gagasan maupun tenaga. Jika dahulu peran komite lebih sebagai pendukung pendanaan, maka sekarang peran komite lebih ditekankan pada aspek lain, terutama dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu pengelolaan pendidikan.

Nugraha (2018) bentuk dukungan komite sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan lebih menekankan pada peningkatan kualitas pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan sarana prasarana di lingkungan sekolah untuk pembelajaran;
- b. Membuat program penerapan kedisiplinan guru, siswa dan karyawan di sekolah;
- c. Memaksimalkan anggaran operasional sekolah dan mendorong penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian atau argument di atas maka dapat disimpulkan bahwa ketika Peran komite sekolah sebagai badan pendukung dapat dijalankan dengan baik maka akan menjadi sebuah sumbangsi yang sangat luar biasa diberikan kepada sekolah sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di SMPN 1 Sendana yang berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Misalnya, komite sekolah ikut membantu dan menunjang dalam masalah sarana dan prasarana sekolah, dan juga dalam pengembangan fisik sekolah komite sekolah melakukan serangkaian kegiatan dari perencanaan, penggalan dana, pelaksanaan sampai pelaporan.

Terkhusus pada dukungan komite yang berupa penggalan dana, belum terlalu maksimal meskipun dalam permendikbud No 75 tahun 2016 ayat 3 point b, dikatakan bahwa salah satu tugas komite adalah melakukan penggalan dana dari masyarakat, baik perorangan maupun berbentuk usaha. Hal ini terlihat dari hasil dokumentasi peneliti dimana tidak terdapat pencatatan nominal dana yang dikelola oleh komite sekolah.

### **3) Komite sekolah dalam melaksanakan Peran sebagai badan pengontrol (*controlling agency*)**

Peranan komite selanjutnya adalah sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Uno (2013:93) menyebutkan bahwa:

Dalam kaitannya dengan komite sekolah, fungsi pengontrol atau pengawasan sangatlah penting dalam rangka transparansi, demokratisasi, dan akuntabilitas penyelenggaraan serta output pendidikan.

Dari penjelasan undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa betapa pentingnya peranan komite sebagai pengontrol dalam pelaksanaan dan pengelolaan dalam satuan pendidikan.

Nugraha (2018) peran komite sekolah sebagai pengontrol atau pengawas yang dapat dilakukan oleh komite sekolah sebagai berikut:

- a. Menanyakan proses belajar mengajar pada guru maupun siswa apakah sudah sesuai dengan standar kompetensi yang diinginkan;
- b. Memantau pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Sekolah;
- c. Turut serta dalam penyusunan RKT dan RKS;
- d. Memantau penggunaan anggaran yang bersumber dari dana BOS;
- e. Mengontrol kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan;
- f. Melakukan pemantauan terhadap proses kegiatan belajar mengajar dan hasil belajar siswa;

Bentuk pengontrolan yang dilakukan komite sekolah dalam hal sarana prasarana biasanya dilakukan satu bulan sekali. Pengontrolan dilakukan secara bergantian oleh komite sekolah dan anggota-anggota komite sekolah lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengontrol dan mengetahui sarana prasarana yang dalam keadaan baik dan yang dalam keadaan tidak baik/rusak. Sejauh ini, kontribusi komite sekolah dalam hal sarana prasarana belum banyak. Komite hanya sebatas melakukan pengontrolan rutin saja. Dalam pencarian danapun komite sejauh ini hanya melibatkan orang tua saja dan tidak melibatkan/mencari bantuan dana perusahaan-perusahaan. Komite merasa kesulitan karena lingkungan sekitar sekolah bukan lingkungan pabrik maupun perusahaan.

Peran komite sekolah di SMPN 1 Sendana melakukan kontrol atau pengawasan pengambilan keputusan kepala sekolah atau perencanaan pendidikan di sekolah, dan juga mengawasi kualitas pendidikan di SMPN 1 Sendana dengan mengontrol proses belajar mengajar, dan juga mengawasi atau mengontrol penambahan fasilitas sekolah seperti, penambahan gambar-gambar huruf hijaiyah, dan gambargambar yang bernuansa islami dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Hasil pengawasan terhadap sekolah akan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup menentukan bagi penyelenggara pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan terutama mutu pendidikan.

#### **4) Komite sekolah dalam melaksanakan Peran sebagai badan penghubung (*mediator agency*)**

Peranan komite sekolah selanjutnya adalah sebagai Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat di satuan pendidikan. Uno (2013:94) menyebutkan bahwa:

Kaitannya dengan peran komite sebagai mediator atau penghubung, sekolah itu sendiri merupakan lembaga sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat lingkungannya, sebaliknya masyarakat juga tidak dapat dipisahkan dari lembaga sekolah. Keduanya memiliki kepentingan yang saling terkait, sekolah merupakan lembaga formal yang disertai tugas untuk mendidik, melatih dan membimbing generasi penerus masa depan, sementara masyarakat merupakan pengguna jasa pendidikan tersebut. Masyarakat mengharapkan agar lembaga sekolah mampu menempa peserta didik menjadi sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas untuk mengembangkan potensi masyarakat setelah mereka lulus.

Nugraha (2018) tugas dan peran komite sekolah sebagai mediator atau penghubung yakni:

- a. Menghubungkan sekolah dengan instansi pemerintah;

- b. Menghubungi orang tua siswa untuk meminta kesediannya menjadi penyumbang dana yang diperlukan untuk kegiatan memajukan pendidikan di sekolah;
- c. Mencari informasi yang terkait dengan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah;
- d. Memberi laporan kepada masyarakat tentang penggunaan keuangan dan pelaksanaan program di satuan lembaga pendidikan tersebut.

Peran komite sekolah sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, sekolah orang tua dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat ataupun ada penyampaian sekolah terhadap orang tua siswa semuanya itu melalui komite sekolah. Peran sebagai mediator ini memerlukan kecermatan dalam mengedintifikasi kepentingan, kebutuhan dan keluhan orang tua dan masyarakat. Aspirasi yang disalurkan melalui komite sekolah dimanfaatkan oleh sekolah sebagai masukan bagi koreksi ke arah perbaikan. Keberada ankomite sekolah di SMPN 1 Sendana ini banyak memberi manfaat, yang mana dengan adanya komite sekolah maka aspirasi orang tua bisa terwakilkan dan juga apabila ada penyampaian sekolah kepada orang tua itu disampaikan oleh komite sekolah secara kekeluargaan. Selain itu pihak sekolah juga selalu mendapat dukungan dari komite sekolah agar terusdapat meningkatkan mutu pendidikan.

#### **5) Faktor pendukung dan penghambat peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMPN 1 Sendana .**

Setiap lembaga suatu organisasi pasti memiliki faktor-faktor yang mendukung dan menghambat jalannya sebuah organisasi tersebut. Faktor pendukung dan penghambat dalam suatu kegiatan pastilah ada, begitu juga dengan organisasi komite sekolah yang ada di SMPN 1 Sendana dalam menjalankan fungsinya. Dalam pelaksanaan peningkatan mutu, sekolah memiliki faktor yang dapat mensukseskan program-program yang telah direncanakan oleh sekolah dengan komite sekolah.

Dengan faktor pendukung ini, sekolah lebih mudah untuk melaksanakan program-program yang terkait dengan upaya peningkatan mutu, karena selain mempermudah pelaksanaannya juga dapat dijadikan motivasi dalam proses berlangsungnya program tersebut. Adapun faktor pendukung itu diataranya :

- a. Ada kesamaan visi antara sekolah dan Komite Sekolah.
- b. Komunikasi dan koordinasi yang baik dan harmonis antara sekolah dengan Komite Sekolah yang sudah terjalin.
- c. Adanya saling keterbukaan antara Komite Sekolah dengan sekolah, sehingga sekolah tidak merasa diawasi.
- d. Kerja sama yang baik yang telah terbina antara unsur-unsur di dalam sekolah dan unsur-unsur dalam masyarakat bersama anggota komitesekolah.
- e. Terwujudnya kekompakan wali murid dalam melaksanakan hasil kesepakatan dalam mendukung program sekolah.

Dengan adanya faktor pendukung ini kita bisa melihat bahwa adanya kesamaan antara visi sekolah dan komite sekolah, yang menjadikan kerjasama yang baik dan dorongan yang baik dimana terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dan harmonis sehingga terjadi kekompakan dalam menjalankan sebuah program kerja yang membuat wali murid juga ikut sepakat dan mendukung program kerja sekolah.

Dari beberapa faktor pendukung yang teridentifikasi di atas, antara sekolah, Komite dan masyarakat berusaha seoptimal mungkin untuk mendukung dan melaksanakan program-program yang terkait dengan upaya peningkatan mutu pendidikan. Selain faktor pendukung, peran komite sekolah juga memiliki factor penghambat terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMPN 1 Sendana . Lembaga komite



sekolah telah ada dan dibentuk di setiap sekolah di Indonesia. Tetapi keberadaan komite sekolah masih banyak menghadapi beberapa hambatan. Penyebabnya antara lain: (1) karena pelaksanaan dan fungsi komite sekolah tidak selalu dapat memenuhi harapan tersebut, (2) pelaksanaan peran dan fungsi komite sekolah masih sangat variatif.

Beberapa masalah pokok lain yang dihadapi tentang komite ini yang akhirnya dikatakan peranannya belum optimal, mungkin ini dikarenakan komite sekolah yang ada di SMPN 1 Sendana hanya bersifat sementara. Adapun yang menjadi faktor penghambat diantaranya :

- a. Kurangnya waktu yang tersisihkan untuk organisasi.
- b. Kurangnya koordinasi antara pengurus.

Dari masalah di atas bisa dilihat bahwa, adanya beberapa faktor yang menjadi penghambat peran komite sekolah mungkin dikarenakan pengurus komite sekolah hanya bersifat sementara dan adanya masalah kurangnya SDM dan cuma komite sekolah yang aktif dalam kepengurusan ini. Selanjutnya, kurangnya waktu yang tersisihkan untuk organisasi, ini dikarenakan pengurus berlatar belakang yang berbeda dan menganggap bahwa organisasi komite sekolah bukan pekerjaan pokok mereka, sehingga harus ada keikhlasan menyisihkan waktu untuk organisasi ini. Selanjutnya, kurangnya koordinasi antara pengurus, ini diakibatkan kurangnya pertemuan antar pengurus karena pengurus mempunyai kesibukan masing-masing seperti petani, wiraswasta, dan tokoh masyarakat.

Dari beberapa faktor penghambat peran komite sekolah yang sudah dijelaskan di atas yang menyangkut anggota komite sekolah, ini merupakan tantangan tersendiri bagi komite sekolah di SMPN 1 Sendana, bagaimana kedepannya agar segala yang menjadi faktor penghambat dapat diatasi agar komite sekolah lebih terorganisasi dengan baik dan dapat meningkatkan mutu pendidikan khususnya pendidikan agama Islam di SMPN 1 Sendana.

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMPN 1 Sendana adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*): Komite SMPN 1 Sendana sebagai mitra kerja kepala sekolah telah memberikan pertimbangannya dalam setiap rencana dan program yang telah disusun oleh sekolah, misalnya pengadaan ruang sholat (mushalla), pengadaan perlengkapan sholat (mukenah, sarung, tikar sholat dan sajadah), selain itu juga komite sekolah memiliki peran mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada di sekolah serta memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RKAS.
2. Sebagai badan pendukung (*supporting agency*), peran komite sekolah sebagai badan pendukung bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di SMPN 1 Sendana belum optimal, karena dukungan yang diberikan masih sebatas tenaga, dan dukungan pikiran. Belum mampu memberikan dukungan berupa pengalangan dana sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah
3. Sebagai badan pengontrol (*controlling agency*), komite sekolah di SMPN 1 Sendana melakukan kontrol atau pengawasan pengambilan keputusan kepala sekolah atau perencanaan pendidikan di sekolah, dan juga mengawasi kualitas pendidikan di SMPN 1 Sendana dengan mengontrol proses belajar mengajar, dan juga mengawasi atau mengontrol penambahan fasilitas sekolah. Hasil pengawasan terhadap sekolah akan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup menentukan bagi penyelenggara

pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Peran sebagai pengontrol masih belum maksimal

4. Sebagai badan mediator (*Executive*), komite sekolah sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, sekolah orang tua dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat ataupun ada penyampaian sekolah terhadap orang tua siswa semuanya itu melalui komite sekolah. Peran sebagai mediator ini memerlukan kecermatan dalam mengidentifikasi kepentingan, kebutuhan dan keluhan orang tua dan masyarakat. Aspirasi yang disalurkan melalui komite sekolah dimanfaatkan oleh sekolah sebagai masukan bagi koreksi ke arah perbaikan. Keberadaan komite sekolah di SMPN 1 Sendana ini banyak memberi manfaat, yang mana dengan adanya komite sekolah maka aspirasi orang tua bisa terwakilkan dan juga apabila ada penyampaian sekolah kepada orang tua itu disampaikan oleh komite sekolah secara kekeluargaan. Selain itu pihak sekolah juga selalu mendapat dukungan dari komite sekolah agar terus dapat meningkatkan mutu pendidikan. Peran komite sebagai mediator sudah maksimal
5. Faktor pendukung dan penghambat peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMPN 1 Sendana
  - a. Faktor Pendukung
    - 1) Ada kesamaan visi antara sekolah dan Komite Sekolah.
    - 2) Komunikasi dan koordinasi yang baik dan harmonis antara sekolah dengan Komite Sekolah yang sudah terjalin.
    - 3) Adanya saling keterbukaan antara Komite Sekolah dengan sekolah, sehingga sekolah tidak merasa diawasi.
    - 4) Kerja sama yang baik yang telah terbina antara unsur-unsur di dalam sekolah dan unsur-unsur dalam masyarakat bersama anggota Komite Sekolah.
    - 5) Terwujudnya kekompakan wali murid dalam melaksanakan hasil kesepakatan dalam mendukung program sekolah.
  - b. Faktor Penghambat
    - 1) Kurangnya waktu yang tersisihkan untuk organisasi.
    - 2) Kurangnya koordinasi antara pengurus.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada, Dr. Sulaiman Samad, M.Si dan Ibu Dr. Ratmawati T, M.Pd, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dengan ikhlas sampai tesis ini selesai. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Ismail Tola, M.Pd, Prof. Dr. Baso Jabu, M.Hum, dan Dr. Kamaruddin Hasan, M.Pd, selaku penguji yang telah memberikan saran dan kritikan untuk perbaikan tesis ini. Tidak lupa juga kepada bapak Nurdin S.Pd, M.Pd, selaku Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene yang telah memfasilitasi dan memberikan banyak bantuan dalam melaksanakan penelitian ini. Serta kepada adek adek saya yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a, dan lebih khusus kepada Mulyani sebagai istri penulis yang telah banyak memberikan semangat dukungan dan do'a. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca.

## 7. REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi V*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arismunandar. 2016. *Manajemen Berbasis Sekolah: Peluang dan Tantangan, Cet. Ke 2*. Makassar : Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar
- Gunawan, Adi. 2011. *Kamus Praktis Ilmiah Populer*. Surabaya: Karteko
- Hadi, Sutrisno MA. 2014. *Metodologi Research, Jilid 2*. Yogyakarta: ANDI.

- Hasbullah. 2016. *Otonomi Kebijakan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo
- Hasibuan, H. Malayu S.P. 2012. *Organisasi & Motivasi, Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Imran, Ali. 2011. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia, Proses, Produk & Masa Depan*. Malang: Bumi Aksara.
- Komariah, Djam'an Satori. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Mandra, Muhammad Saeruddin. 2015. *Kelompok Organisasi dan Kepemimpinan*, Cet. Ke 1. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar
- Miles, Manthaw B dan A. Michael Huberman. 2013. Terjemahan Tjejep Rohidi. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar. 2013. *Peranan dan Fungsi Komite Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Sekolah pada SMA Negeri 1 Sape*. Tesis tidak diterbitkan, Makassar: PPs UNM.
- Mulyasa, E. 2012. *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nur. 2013. *Partisipasi Komite Sekolah Dalam Pengelolaan Pendidikan di SMA Negeri Kabupaten Wajo*. Tesis tidak diterbitkan, Makassar: PPs UNM.
- Nurkolis. 2012. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rivai Veithzal. 2014. *Education Manajemen, Analisis, Teori dan Praktik, Edisi pertama*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sagala, Syaiful. H. 2011. *Budaya dan Reinventing Organisasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Samani. 2013. *Manajemen Sekolah*. Jakarta: Depdiknas
- Sastropoetro, Santoso. 2011. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni
- Siagian, Sondang P. 2012. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gajah Mada Universitas
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif, Cetakan ke 4*. Bandung: Alfabeta
- Suparlan. 2014. *Pemberdayaan Komite Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Suryosubroto, B. 2011. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suyanto. 2012. *Peranan Keluarga Dalam Meningkatkan Kualitas Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kurniawan. 2018. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Pemerintah Indonesia 2002, *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional
- Pemerintah Indonesia 2016, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah*. Jakarta :Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Joharis lubis & Haidir 2019, *Administrasi dan Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Daya Manusia*. Jakarta: Prenamedia Group
- Isjoni 2006, *Membangun Visi Bersama Aspek-aspek penting dalam Reformasi pendidikan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia